

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

1. Yahya et al (2007) meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Banda Aceh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, responden berjumlah 43 responden terdiri dari 1 akuntabilitas publik untuk setiap instansi Pemerintah daerah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Banda Aceh baik secara simultan (uji F) dan parsial (uji t).
2. Kusumaningrum (2010) meneliti tentang, pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah provinsi Jawa Tengah, penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala sub bagian/Kepala sub seksi pada lembaga teknis daerah propinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Analisis regresi yang dijalankan dengan perangkat lunak *statistical product and service solution* (SPSS) digunakan untuk menganalisis data. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan pengujian hipotesis melalui uji f dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Herawaty (2011) yang meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda dengan uji hipotesis secara simultan dan parsial. Penelitiannya merupakan penelitian survey dengan responden bagian keuangan, dua orang tiap instansi sehingga jumlah responden sebanyak 26 orang. Hasil penelitian memperlihatkan secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dikota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel-variabel X1 (kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (pengendalian akuntansi). Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3). Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 66,4%. Yang berarti sebanyak 33,6% ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.

4. Elvira (2011) meneliti tentang, pengaruh *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode survey yang terdiri dari descriptive survey dan explanatory survey dengan investigation type yang bersifat kausalitas. Unit dari penelitian ini adalah organisasi yaitu kepala SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hasil pengujian validitas kuesioner penelitian menggunakan Korelasi Product Moment, dimana dari 46 item pertanyaan yang terdiri 18 item untuk variabel X1, 12 item untuk variabel X2 dan 16 item untuk variabel Y dan 12 item untuk variabel M diperoleh r-hitung diatas 0,3 sehingga semua item dalam kuesioner penelitian valid. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha untuk semua variabel dan diperoleh hasil nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Untuk variabel X1, X2, Y dan M masing-masing nilai Cronbach Alpha sebesar 0,901, 0,861, 0,894 dan 0,938 sehingga semua variabel reliabel. penerapan *Good Governance* dan

standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai hubungan yang erat (kuat) dengan akuntabilitas keuangan dimana diperoleh koefisien korelasi sebesar 96,1%. Dengan memasukan variabel pemoderasi terbukti memperkuat hubungan X1, X2 ke Y dari 89,2 % menjadi 96,1%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Black (2001), Durnev dan Kim (2002), Andono (2004) dan Darma (2004) dimana *good governance*, SAP/IPSAS dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas publik (keuangan).

5. Anjarwati (2012) meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 51 SKPD diwilayah Tegal dan Pemalang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan Sistem Pelaporan dan *Good Governance* sebagai alat untuk mempengaruhi Akuntabilitas.

Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel, obyek, dan periode yang diteliti.



Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	Yahya et al (2007)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Banda Aceh.	Variabel Independen: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Variabel Dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Metode regresi berganda.	Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Banda Aceh baik secara simultan (uji F) dan parsial (uji t).
2.	Kusumaningrum (2010)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa tengah.	Variabel Independen: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Variabel Dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Analisis regresi yang dijalankan dengan perangkat lunak <i>statistical product and service solution</i> (SPSS).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Lanjutan Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
3.	Herawaty (2011)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi.	Variabel Independen: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Variabel Dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Analisis yang digunakan regresi linier berganda dengan uji hipotesis secara simultan dan parsial	Hasil penelitian memperlihatkan secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dikota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel-variabel X1 (kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (pengendalian akuntansi). Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3). Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 66,4%. Yang berarti sebanyak 33,6% ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.
4.	Elvira Zeyn (2011)	Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi	Variabel Independen: good governance dan standar akuntansi pemerintahan. Variabel Dependen:	menggunakan metode survey yang terdiri dari descriptive survey dan explanatory survey dengan	Hasil penelitian memperlihatkan penerapan Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai hubungan yang erat (kuat) dengan akuntabilitas keuangan dimana

Lanjutan Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
		sebagai pemoderasi.	akuntabilitas keuangan.	investigation type yang bersifat kausalitas.	diperoleh koefisien korelasi sebesar 96,1%.
5.	Anjarwati (2012)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang.	Variabel Independen: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Variabel Dependen: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.		Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Bastian, 1999). Dari definisi tersebut dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta, jadi akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006: 15).

2.2.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik baru muncul akhir-akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi diperguruan tinggi. Sebelumnya pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit dan lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan (Bastian, 2006: 19).

Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia lebih ke Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik. Perekonomian Amerika Serikat lebih menekankan pada sektor swasta. Peranan negara dalam perekonomian sangat minimal. Pemerintah sangat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat dan

daerah. Akibat dari sistem yang demikian, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya di sektor pemerintahan. Jadi akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Kondisi Indonesian tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih lima puluh tahun ini. Jadi pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak kosongnya pengaturan praktik-praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu hal yang amat substansial adalah konsesus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya. Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan:

1. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni:
 - a. Akuntansi Pemerintah Pusat.
 - b. Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - c. Akuntansi Parpol dan LSM.

- d. Akuntansi Yayasan.
 - e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
 - f. Akuntansi Tempat Peribadatan: masjid, gereja, vihara, kuil.
2. Aktivitas yang mendekati diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.

2.2.2 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Namun, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. (Mardiasmo: 2002)

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, *stakeholder* yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan.

1. Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimalkan laba (*profit motive*), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik. Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian

pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.

2. Sumber pembiayaan

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, *charging for service*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (*retained earnings*) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

3. Pola pertanggungjawaban

Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik

berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4. Struktur organisasi

Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi.

5. Karakteristik anggaran dan *stakeholder*

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Dari sisi *stakeholder*, pada sektor

publik *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada *stakeholder* internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah. *Stakeholder* eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang. Pada sektor swasta, *stakeholder* internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan *stakeholder* eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.

6. Sistem akuntansi yang digunakan

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual (*accrual accounting*). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash basis accounting*).

2.3 Pengertian Sistem

Berikut beberapa literatur mengenai pengertian sistem, menurut Mulyadi (2010:5) “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Sedangkan menurut Hall (2007:6) “Sistem (*system*) adalah kelompok dari dua atau lebih komponen

atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”. dan menurut Marshall (2006:2) “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lain dan berfungsi bersama-sama untuk mencapai hubungan tertentu. Setiap sistem yang dibuat juga berguna untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi.

Terdapat perbedaan antara pengertian sistem dan prosedur, “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang” (Mulyadi, 2010:5)

Mulyadi (2010:5) menyebutkan bahwa kegiatan klerikal (*Clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, jurnal dan buku besar :

- a. Menulis.
- b. Mengadakan.
- c. Menghitung.
- d. Memberi kode.
- e. Mendaftar.

- f. Memilih (mensortasi).
- g. Memindah.
- h. Membandingkan.

Berdasarkan definisi dan penjelasan diatas maka sangat jelas bahwa sistem dan prosedur itu berbeda. Karena sistem sendiri terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

2.3.1 Pengertian Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab . Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

Pelaporan tidak dibawa langsung oleh atasan pada waktu mengadakan pengawasan, tetapi “diantar” oleh bawahan baik dibawa sendiri maupun dikirim. Laporan dibuat oleh semua personal yang mendapat tugas dari atasan. Laporan bukan merupakan monopoli para atasan saja. Karena atasan harus membuat laporan kepada atasannya lagi. Laporan yang disampaikan kepada atasan tidak harus berupa uraian lengkap seperti memorandum akhir jabatan, atau tidak juga seperti laporan penelitian yang wujudnya tebal dengan sistematika baku, tetapi dapat disusun mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling lengkap.

2.3.2 Sistem Pelaporan

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Mengingat kedudukan dan peranan pelaporan itu sangat penting, maka laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan, baik karena kedudukannya sebagai pimpinan Daerah maupun sebagai pimpinan pemerintahan dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Karena ketentuan-ketentuan ini sifatnya mengatur tentang pelaporan, yang menyangkut soal sistem, prosedur, tata cara, waktu, isi, jenis dan format serta tindak lanjut laporan, maka dituangkan dalam bentuk hukum peraturan pemerintah. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelaporan tidak hanya dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, tetapi sekaligus juga mengatur laporan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangannya dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Sistem pelaporan adalah ketentuan yang mengatur jenis, materi, sistematika, penyusunan dan penyampaian, koordinator serta penanggungjawab laporan yang menjadi kewajiban unit kerja daerah. Sedangkan naskah dinas yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu disebut pelaporan.

Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan di daerah provinsi, kabupaten/kota disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yang bertanggung jawab terhadap laporan adalah pejabat tertinggi pada unit kerja, SKPD/Instansi provinsi dan SKPD/instansi kabupaten/kota yang berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya. Koordinator penyusun laporan adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan sub unit kerja di lingkungan unit kerjanya atau unit kerja terkait.

2.3.3 Tata Cara Penyampaian Laporan

Tata Cara Penyampaian Laporan Diatur sebagai Berikut:

a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi

SKPD/Instansi Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan dan setiap tahun kepada Gubernur dan kepada Menteri, dengan tembusan Inspektur Jenderal, Kepala Balitfo dan Direktur Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Laporan SKPD/ Instansi Kabupaten/Kota

SKPD/Instansi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota dan Kepala SKPD/Instansi Provinsi yang bersangkutan setiap bulan/tahun.

2.3.4 Waktu penyampaian laporan

Waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut:

a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi

Laporan bulanan pelaksanaan tugas SKPPD/Instansi Provinsi disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan pada minggu keempat bulan Januari pada tahun berikutnya.

b. Laporan SKPD/Instansi Kabupaten/Kota

Laporan bulanan pelaksanaan tugas SKPPD/Instansi Kabupaten/ Kota disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan pada minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berikutnya.

2.3.5 Laporan Keuangan Publik dan Swasta

Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan.

2.4 Sistem Informasi

Hall (2007:9) mendefinisikan “sistem informasi (*information system*) adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna”. Menurut Marshall (2006:11) “Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti”. Menurut Davis (1985) dalam Mardi (2011:5) “informasi adalah

data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami didalam keputusan sekarang maupun masa depan”. Sedangkan menurut Chusing (1985) dalam Mardi (2011:5) “informasi menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya.

Informasi merupakan bagian penting didalam sistem dan juga dalam melakukan pengambilan suatu keputusan, informasi dapat bermanfaat jika informasi tersebut berpaut dengan keputusan sasaran informasi, dapat dipahami, dapat dipakai oleh pengguna, dan pemakai mempercayai informasi tersebut.

2.4.1 Karakteristik informasi

Menurut Marshal (2006:12) informasi dapat berguna dan memiliki arti bagi pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jika memiliki 6 karakteristik sebagai berikut:

1. Relevan, informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.
2. Andal, informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.
3. Lengkap, informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.

4. Tepat waktu, informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan.
5. Dapat dipahami, informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.
6. Dapat diverifikasi, informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama.

2.4.2 Tujuan Adanya Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan Perspektif Islam

Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang ada didalam sebuah perusahaan atau organisasi, seperti yang telah diperintahkan didalam Al-Quran surat An-Nisaa' (4: 29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat di atas, terdapat dua kata kunci yang tersirat, yaitu *tijarah* (perniagaan) dan saling suka/ *ridha*. Maka jelaslah bahwa di dalam Al-Quran juga telah diatur agar manusia itu tidak memakan harta dengan jalan yang batil, sehingga dengan adanya sistem informasi akuntansi aka mengurangi kecurangan yang disebabkan oleh manusia.

2.5 Pengertian *Good Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. (Mardiasmo, 2009: 17)

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.5.1 Penerapan *Good Governance*

Bersatu bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik/amanah (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap.MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (state, private sector and society).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governace* (Osborne and Geabler , 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan BPKP , 2000; 6) adalah sebagai berikut:

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.
- Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/ aspirasi masyarakat.

- Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

2.5.2 Karakteristik *Good Governance*

UNDP dalam Mardiasmo (2009: 18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

- g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

2.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas (Krina, 2003: dalam Abdullah) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009: 18) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Tjahjanulin (2002: 54) Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003: 11) sebagai berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi.

Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.

3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan.

Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.

4. Kelayakan dan konsistensi.

Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.

5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

2.6.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002: 21) Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.

Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002: 36).

2.6.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Konsep akuntabilitas tersebut dalam Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun hasilnya. Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, maka pekerjaan yang dibebankan akan bisa berjalan sesuai

dengan yang diharapkan. Akuntabilitas dalam Islam sendiri berbeda dengan sistem akuntabilitas yang berasal dari negara-negara barat. Jika konsep barat lebih menekankan pada hasil, maka Islam menganjurkan penganutnya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam proses selain tentunya pada hasil yang ingin dicapai. Manajemen barat menitik beratkan pada pemimpin untuk meraih tujuan dari sebuah tim bagaimanapun caranya sementara Islam juga menekankan pentingnya proses dan akuntabilitas Islam menyoroti bahwa proses untuk mencapai tujuan tersebut harus menempuh cara-cara yang sesuai dengan syariah.

Hubungan setiap muslim dengan Allah SWT harus menjadi landasan penting di dalam akuntabilitas Islam. Hal ini bertujuan agar setiap muslim tidak melenceng dari jalur-jalur yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Islam mengenal beberapa hal yang diharamkan dan proses di dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan hendaknya tidak dilakukan dengan menghalalkan hal-hal tersebut. Seorang pemimpin yang baik dalam Islam bukan hanya orang yang memiliki kemampuan untuk membawa tim yang dipimpinnya meraih hasil yang diinginkan tetapi juga memperhatikan proses interaksi dalam tim tersebut.

Pemimpin tidak boleh menjadi orang yang congkak dan kasar di dalam kepemimpinannya karena hal-hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang bijaksana serta mampu menampung aspirasi dari anak buahnya dengan baik. Apabila ada suatu masalah, maka harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh anggota tim. Prinsip Syura, keadilan atau kesetaraan dan kebebasan yang disertai penerapan etika yang baik (adab al-iktilaf) wajib diterapkan oleh setiap pemimpin. Selain itu, seorang

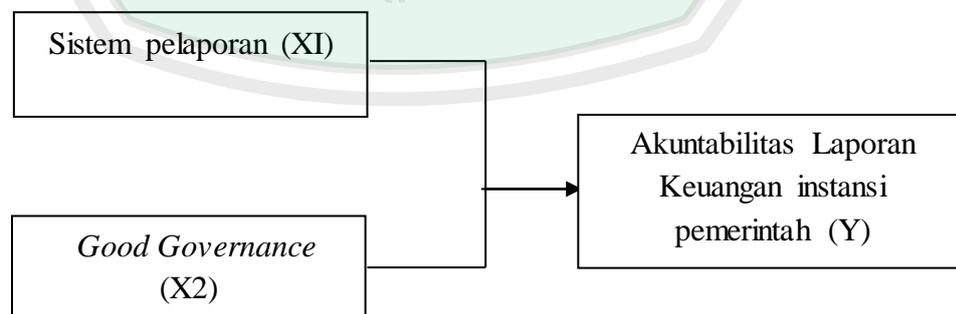
pemimpin juga harus tegas di dalam menetapkan standar kerja yang harus dijalankan oleh anggota timnya. Dengan memperhatikan hal-hal penting tersebut, maka sebuah tim akan bisa mencapai hasil yang terbaik dalam kinerjanya.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan tinjauan teori dan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, disajikan kerangka konseptual sebagaimana dalam gambar berikut ini:

Gambar: 2.1 Kerangka Konseptual



2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2009: 96).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.8.1 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Dalam LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) bagian akuntabilitas kinerja terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas Kinerja meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran. Sedangkan analisis keuangan berisi alokasi dan sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi. Keduanya adalah instrumen LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), dan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan jenis-jenis laporan yang terpisah, meskipun diharapkan penyusunannya dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.

Apabila Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan diintegrasikan secara penuh, sebenarnya dalam hal pemeriksaan oleh BPK tidak ada masalah. Hal ini karena berdasarkan UU 15/2004 disebutkan bahwa BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Apabila pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah menghasilkan opini, pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Penggabungan tersebut dapat mengambil bentuk suatu laporan terpisah atau suatu laporan lengkap. Dalam hal ini, di Amerika Serikat, berdasarkan Government and Results ACT of 1993 (GPRA) terdapat satu saja Laporan Akuntabilitas, yang mencakup informasi program dan informasi keuangan (termasuk laporan keuangan yang sudah diaudit) serta ukuran-ukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Artely, Ellison, & Kennedy, 2001).

Akan tetapi keputusan Kepala LAN yang diterbitkan tahun 2003 tersebut sampai saat ini belum diganti atau belum ada keputusan yang baru. Seperti yang diuraikan secara singkat di atas, pada keputusan tersebut belum tergambar adanya penggabungan antara laporan kinerja dengan laporan keuangan. Jika dicermati uraian pada akuntabilitas keuangan, ternyata hanya berisi rencana dan realisasi anggaran serta analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penelitian Yahya et al (2007) menunjukkan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kemudian pada peneliti lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Kusumaningrum, 2010), penelitian dari Herawaty (2011) memperlihatkan secara simultan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian-penelitian tersebut, dapat diajukan hipotesis mengenai pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

H1 : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintah daerah.

2.8.2 Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Dalam penelitian Elvira (2011) menunjukkan bahwa *Good Governance* mempunyai hubungan yang erat (kuat) dengan akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian-penelitian tersebut, dapat diajukan hipotesis mengenai pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

H2 : Good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintah.